



Buletin Parlementaria

Nomor 1052/I/V/2019 • Mei 2019



Jadikan NYIA Sebagai Ikon Kawasan Joglosemar



9 772614 339005



4 Ketua DPR Dorong
Penggunaan
Kendaraan Listrik



6 Pimpinan DPR Dorong
TVR Parlemen Kemas
Informasi Secara Menarik

Jadikan **NYIA** Sebagai Ikon Kawasan Joglosemar



Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI meninjau NYIA. Foto: Erman I Hr

Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan Bandar Udara (Bandara) New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang menjadi penghubung kawasan Jogja, Solo dan Semarang (Joglosemar) harus mendapat dukungan dari semua pihak tak terkecuali masyarakat. Ia juga menekankan agar bandara NYIA kelak dapat dijadikan ikon pengembangan kawasan wisata maupun industri di tiga kawasan tersebut.

Hal itu diungkapkan Aria Bima saat memimpin rapat tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI terkait pengembangan wisata di kawasan Joglosemar dan progres pembangunan Bandara NYIA dengan beberapa

”

“MARI KITA JAGA BERSAMA BANDARA INI SEBAGAI KONEKTIVITAS UNTUK JOGLOSEMAR

mitra kerja diantaranya PT. Angkasa Pura I (persero), PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk, PT. Kereta Api Indonesia (persero), PT. Taman Wisata Candi (persero), Perum Perhutani, PT. Aerowisata dan lainnya di Bandara NYIA, Kulon Progo, Yogyakarta, Kamis (2/5).

“Mari kita jaga bersama bandara ini

sebagai konektivitas untuk Joglosemar. Dalam hal pengembangan *regional development* khususnya pariwisata, tidak pernah lepas dari aspek konektivitas bandara, baik untuk kebutuhan *tourism* domestik maupun mancanegara. Ke depan Bandara ini harus menjadi ikon dari Joglosemar untuk pengembangan wilayah di Jogja, Solo dan Semarang,” ujar Bima.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menambahkan bahwasanya Komisi VI DPR RI akan terus memberikan dukungan terutama keputusan politik yang berupa penguatan anggaran terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur bandara. “Dengan keputusan politik anggaran khususnya untuk pelebaran jalan atau pembuatan jalan tol sebagai akses menuju ke bandara NYIA serta bandara patut juga terkoneksi dengan kereta api,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Humas PT. KAI Daerah Operasi VI Yogyakarta, Eko Budiyanto menerangkan pada tahap awal sudah ada kereta khusus untuk menuju ke bandara NYIA sampai Wojo untuk relasi dari Solo, Maguwo dan Yogyakarta. Kemudian dari Wojo akan terhubung dengan bus Damri menuju ke bandara. Ke depan, segera dibangun jalur kereta dari Stasiun Kedundang sampai bandara dan tembus ke Wojo. “Selain kereta khusus, nantinya juga ada Prameks (Prambanan Ekspres) yang berhenti di Wojo,” pungkas Eko.

Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI meninjau pembangunan bandara NYIA di Yogyakarta juga dihadiri oleh Darmadi Duriyanto dan Adisatrya Suryo Sulisto (F-PDI Perjuangan), Sartono Hutomo (Fraksi Partai Demokrat), Slamet (Fraksi PKS) serta Abdul Aziz dari (Fraksi PPP). ■ es



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima audiensi perwakilan Advokat Senopati 08 dan Ibu-Ibu Milenial Relawan PADI. Foto: Azka I Hr

Fahri Hamzah Minta KPU Investigasi Meninggalnya Petugas KPPS

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk terbuka dan melakukan investigasi atas tingginya angka jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia pada Pemilu yang dilaksanakan serentak pada 17 April 2019 lalu. Fahri menilai ada kejanggalan dari meninggalnya ratusan petugas KPPS itu.

Hal itu diungkapkan Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu saat menerima audiensi perwakilan Advokat Senopati 08 dan Ibu-Ibu Milenial Relawan PADI, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5). Pertemuan ini membahas beberapa temuan terkait potensi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, dan meninggalnya ratusan petugas KPPS.

"Sebaiknya pemerintah terbuka dengan apa yang terjadi, terutama KPU. Dibuka saja masalahnya apa, dan investigasi terhadap korban harus terus dilakukan. Beberapa hasil investigasi cukup mengagetkan adalah modus dari meninggalnya, sebagian ada kemungkinan adanya racun. Oleh

karena itu, jangan dibiarkan ini jadi spekulasi," kata Fahri.

Dalam pertemuan tersebut, legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu juga akan mengusulkan kepada Komisi II DPR RI untuk mendukung dibentuknya tim investigasi yang akan mencari fakta secara medis terkait meninggalnya petugas KPPS pada Pemilu 2019.

"Komisi II sebaiknya mendukung dibentuknya Tim Investigasi, khususnya kepada (petugas KPPS) yang meninggal. Bukan soal kecurangan dan lain-lain. Fokus pada nyawa saja. Tidak mungkin ada orang kelelahan, tiba-tiba meninggal. Harus dicek satu-persatu secara medis sehingga kita bisa melihat gambaran besarnya seperti apa," imbuh Fahri.

Fahri mengimbau kepada masyarakat untuk turut bersuara jika menemukan kejanggalan terhadap kasus ini. "Jangan biarkan satu nyawa pun hilang, tapi kita diam saja. Kita semua harus punya sikap yang sama terhadap nyawa, nyawa itu berharga, nyawa itu tidak boleh hilang begitu saja tanpa sebab. Kita harus melindungi hilangnya nyawa dengan segala yang kita punya," pungkasnya. ■ **atw/sf**



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Sofyan Efendi, Erman Suhendri, S.Sos.I.

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistono, S.H., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom,

Natasya Arnanda Prihandini, S.Kom. Rahayu Setyowati,

Muhammad Husen Virgianne Meiske Patuli,

Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar,

Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Singih

Rimbani Kimanti, Siti Nadiyah, Riyan Hidayat, Animbi Puspa

Ratri, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indrianti,

Mohammad Rizki Nugraha, Puntho Pranowo.

FOTOGRAFER

Naeufuroji, M. Andri Nurdiansyah

Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman,

R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah

Geraldi Opie.

ANALIS MEDIA

Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari,

Sunarya, Fahmi Harfa, Nathan Dimas Saminto,

Safitri Restu Widyowati. SIP.

INFOGRAFI

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,

Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Anif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email: bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Ketua DPR Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat berkunjung ke IIMS 2019, di Kemayoran, Jakarta. Foto: Ojie I Odi

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong penggunaan kendaraan listrik, baik motor maupun mobil, bisa terus meningkat dan menjadi *trend* baru di Indonesia. Selain ramah lingkungan, ekonomis serta efisien, kendaraan listrik akan menjadi alat transportasi utama di masa depan.

Sebagai salah satu dukungan nyata, Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu memesan satu unit motor listrik karya anak bangsa, GESITS, pada ajang pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019. Sebelumnya, Bamsoet juga sudah menggunakan mobil listrik TESLA sebagai kendaraan harian.

“Motor GESITS sebagai salah satu pioner industri kendaraan listrik di Indonesia harus kita dukung dengan cara membeli dan memakainya. Di ajang IIMS 2019 ini sudah dibuka pemesanan. Saya sudah pesan satu yang warna kuning. Dari informasi di *stand*, sudah ada dua ribu pemesan. Ke depan kita akan bentuk komunitas motor listrik untuk semakin mengkampanyekan penggunaan kendaraan listrik sebagai

sarana transportasi handal,” ujarnya saat berkunjung ke IIMS 2019 di Kemayoran, Jakarta, Minggu (5/5).

Politisi Partai Golkar itu akan memelopori pembentukan komunitas Motor dan Mobil listrik di Indonesia. Kendaraan listrik harus jadi *trend* gaya hidup baru di masa depan karena efisien dan ramah lingkungan. “Jangan kalah dengan negara-negara Eropa yang akan melarang kendaraan konvensional berbahan bakar minyak mengaspal di jalan-jalan pada tahun 2030. Semua harus beralih ke elektrik,” tambah Bamsoet.

Ia menerangkan, saat ini di Jabodetabek saja jumlah kendaraan roda dua sudah mencapai 18 juta. Sedangkan di tingkat nasional mencapai 91 juta. Tak heran jika polusi udara di Indonesia cukup tinggi. Dengan jumlah kendaraan motor di DKI Jakarta yang mencapai 18 juta, tingkat polusi udara Jakarta menjadi yang terburuk di Asia Tenggara versi World Air Quality Report 2018. “Jika kita beralih ke motor listrik, niscaya akan memberikan kontribusi pada pembersihan udara di langit

Indonesia,” tutur Bamsoet.

Sebagai langkah awal menggerakkan kesadaran pentingnya menggunakan kendaraan listrik, legislator dapil Jawa Tengah VII ini menyarankan aparat pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai menggunakan kendaraan listrik, khususnya motor GESITS sebagai pilihan kendaraan dinas. Selain ikut menggerakkan roda industri nasional, juga telah memberi contoh baik kepada masyarakat umum.

“Jangan sampai motor GESITS sebagai karya anak bangsa tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Di sinilah nasionalisme dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara diuji. Political will dari pemerintah dibutuhkan, dari mulai kemudahan regulasi, pemberian insentif, sampai dengan penyediaan lahan pasar pengguna yang bisa dimulai dari internal pemerintah maupun BUMN,” terang Bamsoet.

Sebagai Dewan Pembina Perkumpulan Ojek Daring Indonesia (PRODA), Bamsoet juga akan mengajak para ojek *online* mulai beralih ke motor listrik. Selain itu, industri *start up* transportasi *online* juga diharapkan bisa memfasilitasi penggunaan motor listrik kepada para mitra kerjanya, misalnya dengan cara kemudahan kredit kepemilikan.

“Mengecas baterai bisa menggunakan sumber listrik di rumah dengan biaya yang jauh lebih murah ketimbang membeli bahan bakar. Sehingga para ojek *online* khususnya, tak perlu lagi membakar uang di jalan raya. Uang membeli bahan bakar bisa digunakan untuk keperluan belanja rumah tangga lainnya. Lingkungan sehat, kantong juga sehat,” pungkas Bamsoet. ■ oji/sf

Kecurangan Pemilu Harus Ditindak

Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) DPR RI Fadli Zon menilai kecurangan Pemilu yang begitu masif seharusnya bisa ditindak secara serius oleh penyelenggara Pemilu. Karena ini berkaitan dengan konstitusionalitas dan legitimasi hasil Pemilu, Fadli pun menghimpun banyak informasi kecurangan, seperti *money politics* hingga salah *input* data yang menurutnya adalah kecurangan Pemilu yang paling mendasar.

Hal itu ia ungkapkan saat mengunjungi Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (3/5), guna menjalankan tugas pengawasan DPR RI terkait penyelenggaraan Pemilu 2019. Turut serta mendampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria. “Kita datang ke KPU sebagai Pimpinan DPR dan untuk melihat langsung bagaimana menghitung suara baik *software* dan *hardware*. Karena ini sudah jadi perbincangan di

masyarakat terkait salah *input*,” ujar Fadli.

Menurut Fadli, penghitungan KPU seharusnya bisa dilakukan secara profesional, mengingat anggaran yang digunakan untuk Pemilu cukup besar. Salah *input* data, menurut Fadli, adalah kesalahan terbesar KPU dalam penyelenggaraan Pemilu. “Terkait salah *input*, perlu ditelisik siapa yang membuat kesalahan ini. Termasuk *server*-nya yang terkait dengan Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pemilu supaya jelas. Ini hal yang ingin kami perkuat,” tuturnya.

Karena salah *input* ini telah menjadi perhatian masyarakat yang cukup besar, sehingga perlu disikapi secara serius agar marwah KPU tetap dijaga kepercayaannya oleh masyarakat. Jika KPU sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, maka itu akan menjadi masalah baru. “Menurut saya ini sudah mendapatkan perhatian masyarakat. Ini harus segera ditangani,” sambung politisi



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Foto: Eka Hindra | Hr

Partai Gerindra ini.

Secara kelembagaan, nantinya DPR RI akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019 ini. Untuk sementara, ia akan terus mengumpulkan bukti dan data kecurangan Pemilu. “Sekarang ini contoh kecurangan itu nyata dan ini akan dikumpulkan untuk jadi bukti dan evaluasi untuk sistem ke depan. Terutama untuk salah *input*, menurut saya itu kecurangan, bukan kelalaian,” tutup Fadli. ■ **hs/mh/sf**

Kunjungi KPU, DPR Ingin Pastikan Pemilu Jurdil

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengunjungi Kantor KPU RI guna memastikan proses Pemilu berjalan dengan lancar tanpa adanya kecurangan. Ia mengecek langsung proses rekapitulasi suara secara nasional. Sebelumnya, ia mengaku menerima banyak keluhan terkait adanya potensi kecurangan selama Pemilu 2019 ini berjalan.

“Dalam rangka menjalankan tugas DPR, kami ingin mengecek proses rekapitulasi suara di tingkat nasional dan memastikan proses Pemilu ini jujur dan adil (jurdil),” ungkap Riza kepada wartawan seketika memasuki Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (3/5). Kunjungan ke KPU RI ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.

Karenanya, ia ingin konsultasi dengan KPU terkait sejumlah persoalan yang terjadi selama berlangsungnya pemilu 2019 ini. Politisi Partai Gerindra ini menerima sejumlah permasalahan terkait Pemilu seperti dugaan kecurangan, mobilisasi serta *money politics*.

“Menjelang tanggal 22 Mei kita mau antisipasi, agar proses demokrasi berjalan baik. Kita ingin konsultasi dengan KPU terkait langkah penanganan apa saja terkait kecurangan yang terjadi di TPS hingga PPK. Bahkan, *money politics* ini sangat masif,” ungkap legislator dapil Jawa Barat III ini.

Ia pun mengaku prihatin atas pelaksanaan Pemilu 2019 yang menimbulkan banyak persoalan. Komisi II DPR RI nantinya akan melakukan



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria. Foto: Kresno | Hr

evaluasi Pemilu setelah pembukaan masa sidang yang akan dimulai pada 7 Mei 2019. “Demokrasi kita dibeli oleh uang. Ini yang akan kita benahi. Komisi II akan evaluasi secara menyeluruh. Kita berharap ini bisa dibenahi, banyak sekali evaluasi termasuk di Pemilu luar negeri,” tutup Riza. ■ **hs/mh**

Pimpinan DPR Dorong TVR Parlemen Kemas Informasi Secara Menarik

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mendorong Televisi dan Radio (TVR) Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI untuk memadukan liputan acara kenegaraan di DPR RI pada tahun 2019 seputar nuansa keparlemenan, khususnya untuk TVR Parlemen. Sehingga siaran itu dapat memberikan informasi dan berita perpolitikan di Indonesia, dengan kemasan yang menarik bagi *audience*.

Hal itu diungkapkan Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan ini dalam Rapat Koordinasi TVR Parlemen dengan tema “Persiapan Agenda Kenegaraan Tahun 2019” di DI Yogyakarta, Jumat (26/4/2019). Rakor yang digelar selama Jumat-Minggu (26-28/4) itu turut dihadiri Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapari, staf TVR Parlemen, Bagian Humas, serta Bagian Media Cetak dan Media Sosial.

“Kita akan menyelenggarakan *event* yang sangat penting yaitu Sidang Bersama DPR dan DPD dengan acara Pidato Kenegaraan, Pelantikan Anggota DPR dan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu harus direncanakan lebih dahulu, supaya semua berjalan dengan lancar dan tertib serta aman. Dan dalam pemberitaan tentunya harus menarik,” pesan Agus.

Lebih lanjut terkait dengan keberadaan stasiun televisi lain, politisi Partai Demokrat itu mengatakan bahwa TVR Parlemen mempunyai spesialisasi tentang informasi parlemen. Justru televisi yang lain sering *patching ke* TVR Parlemen, karena mempunyai



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Foto: Eka Hindra | Hr

keleluasaan meliput semua agenda DPR RI, termasuk agenda resmi DPR RI di daerah dan luar negeri. Berita ini sangat penting karena mempunyai dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara pada sesi diskusi, pakar Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Sri Hastjarjo berpendapat bahwa TVR Parlemen harus dapat menjadi jembatan komunikasi antara lembaga negara (DPR RI) dengan publik (masyarakat).

Tiga saran yang diusulkan Sri, pertama agar TVR Parlemen menerapkan keseimbangan konten yang ditayangkan dengan apa yang diinginkan publik dan tentu saja sesuai dengan *rending topic* di media. Kemudian terkait aspek esensi konten harus tetap faktual, akurasi, hangat, dan *news value*, dengan tetap menjaga aspek teknis dari sisi visual audio dan *performance*.

”

...TVR PARLEMEN HARUS DAPAT MENJADI JEMBATAN KOMUNIKASI ANTARA LEMBAGA NEGARA (DPR RI) DENGAN PUBLIK (MASYARAKAT).

Di tengah maraknya penggunaan media sosial sebagai media informasi, Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi UNS Surakarta itu juga menyarankan agar TVR Parlemen menjadi media konvergensi yang tidak hanya menjadi media konvensional, tapi harus masuk ranah media sosial dengan memanfaatkan Facebook, Twitter, Intsagram dan Youtube serta *online streaming*. ■ dz/sf

Pemindahan Ibu Kota Perlu Perencanaan Matang

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menanggapi wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ia menyadari pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan secara instan. Pemindahan ibu kota perlu perencanaan matang, meliputi lokasi pemindahan, daya dukung lokasi, serta pembangunan infrastruktur untuk menopang ibu kota yang baru.

“Apa saja yang masih harus disediakan. Kemudian perencanaan secara jangka panjang. Jadi jangan kita hanya sekadar memindahkan, tapi perencanaan tata ruang dan sebagainya tak kita persiapkan untuk puluhan tahun ke depan. Jadi saya kira perencanaan-perencanaan itu dan itu ada di Bappenas,” papar Zainudin kepada awak media di Jakarta, baru-baru ini.

Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah untuk belajar dari negara lain yang memisahkan pusat bisnis dan pemerintahan di lokasi berbeda. Indonesia harus bisa mencontoh sejumlah negara yang memisahkan ibu kota dan pusat niaga. Beberapa di antaranya, dia menyebut Malaysia, Australia, dan Brasil.

“Tetangga kita yang paling dekat saja, Malaysia pemerintahannya di Putrajaya, kemudian bisnisnya di Kuala Lumpur. Brazil juga begitu. Australia juga begitu pusat bisnisnya di Sydney, kemudian pemerintahannya di tempat lain,” imbuh legislator dapil Jawa Timur XI ini.

Menurutnya pemerintah harus punya keberanian untuk memulai, agar beban Jakarta sebagai ibu kota negara dan juga pusat niaga, serta memikul berbagai persoalan sosial seperti jumlah penduduk, kemacetan, dan banjir bisa diurai tanpa kesulitan. Zainudin berpendapat, saat ini Jakarta sudah tidak memadai untuk menopang penambahan



Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali. Foto: Jaka I Hr

”

**PEMINDAHAN
IBU KOTA PERLU
PERENCANAAN
MATANG, MELIPUTI
LOKASI PEMINDAHAN,
DAYA DUKUNG
LOKASI, SERTA
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
UNTUK MENOPANG
IBU KOTA YANG BARU.**

penduduk.

“Saya kira ini harus ada keberanian memulai. Memang belum tentu akan selesai pada periode ini. Tapi misalnya beliau (Presiden Joko Widodo) diputuskan KPU menjadi pemenang dan akhirnya dilantik untuk periode

kedua, beliau harus berani memulai itu. Apakah sampai selesai periode keduanya bisa terlaksana, itu kita lihat perkembangannya,” ujarnya.

Zainudin juga mengatakan kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis sekarang ini sudah tidak memadai, mulai dari tingkat kemacetan, kebutuhan akan hunian dan lain sebagainya. DKI Jakarta tidak bisa dijadikan pusat bisnis sekaligus pusat pemerintahan. Apalagi kondisi Jakarta yang padat dan macet sudah tidak memadai sebagai ibu kota.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019) lalu. Bahkan wacana pemindahan ibu kota negara ini telah terjadi di era Presiden Soekarno. ■ **eko/sf**

Herman Khaeron Terima Audiensi Mahasiswa UNPAD



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menerima audiensi Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat. Foto: Kresno I Hr

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menerima audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung, Jawa Barat. Audiensi ini dimaksudkan guna *sharing knowledge* terkait situasi dan isu-isu politik terkini terutama menyangkut efektifitas pemilu serentak 2019.

Di hadapan mahasiswa UNPAD, Herman menyampaikan sejumlah penjelasan terkait pelaksanaan pemilu 2019. Beberapa hal ia jelaskan seperti persoalan DPT, kesiapsiagaan petugas TPS terkait pemilu serentak, hingga isu pengembangan *e-voting* untuk pemilu ke depan. Setelah memberikan pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara Herman Khaeron dengan mahasiswa.

Mahasiswa yang hadir pun turut antusias memberikan pertanyaan dan langsung dijawab oleh legislator asal

”

JANGAN BERHENTI MEMBERIKAN GAGASAN DAN PENDAPAT SERTA IDE YANG TERBAIK UNTUK INDONESIA KE DEPAN.

Cirebon tersebut. Saat itu pun, Herman mendorong kepada mahasiswa UNPAD untuk terus menyampaikan gagasan kritisnya ke publik untuk perbaikan kondisi perpolitikan saat ini, karena menurutnya mahasiswa adalah salah satu elemen yang memiliki idealisme dalam menyampaikan gagasan dan pandangannya.

“Jangan berhenti memberikan gagasan dan pendapat serta ide yang terbaik untuk Indonesia ke depan,” tegas Herman, seraya menasihati pada

mahasiswa, Kamis, (2/5) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengakui eksistensi mahasiswa amat dibutuhkan guna menjaga keseimbangan diskursus publik. Sehingga mahasiswa Ilmu Pemerintahan UNPAD pun diharapkan bisa mengisi ruang publik tersebut.

“Bangun terus idealisme dan kekompakan. Negara memanggil eksistensi anda sekalian untuk bisa menjaga proses demokrasi yang adil, jujur, fair, dan mahasiswa FISIP sangat dibutuhkan dalam momentum sekarang ini,” tegas Herman.

Mahasiswa yang hadir pun turut senang dan bangga bisa berdiskusi langsung dengan Herman yang juga merupakan salah satu *best parliamentarians*. Diharapkan edukasi politik semacam ini mampu melecut semangat mahasiswa FISIP untuk terus melakukan dialektika dalam pengembangan demokrasi di Indonesia yang lebih baik. ■ hs/mh



BUMN Bidang Transportasi Berperan Penting Kembangkan Bali



Tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto bersama jajaran PT. Angkasa Pura I, PT. Garuda Indonesia, serta PT. Pelindo III di Bandara Ngurah Rai, Bali. Foto: Erman I Hr

Perkembangan sektor perekonomian Provinsi Bali saat ini sedang meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Bali tumbuh di angka 6,35 persen, dengan catatan pertumbuhan tertinggi terdapat pada lapangan usaha kategori F (konstruksi) sebesar 10,44 persen. Sektor transportasi dalam hal ini tentu berperan penting dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan aktivitas ekonomi khususnya mobilisasi barang dan jasa.

Melalui Kunjungan Kerja (kunker) reses, Komisi VI DPR RI melihat langsung perkembangan sektor perekonomian Provinsi Bali. Hal ini disampaikan langsung oleh pimpinan Tim kunker yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto dalam

rapat dengan PT. Angkasa Pura I, PT. Garuda Indonesia, serta PT. Pelindo III di Bandara Ngurah Rai, Bali, Kamis (2/5).

“Salah satu peran BUMN yang dibutuhkan adalah BUMN bidang Usaha Konstruksi serta Sarana dan Prasarana Perhubungan. Dengan adanya Peran PT. Angkasa Pura I, PT. Garuda Indonesia, dan PT. Pelindo III maka diharapkan adanya sinergi BUMN yang baik dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Dito.

Pada era keterbukaan ekonomi saat ini, diakui Dito, pendistribusian barang dan jasa dilakukan melalui perdagangan antar pulau. Masing-masing daerah melakukan pemenuhan kebutuhan yang tidak hanya berasal dari wilayahnya sendiri melainkan juga dari wilayah lain. “Transportasi

di Indonesia kini telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Pembangunan jalan tol, *short cut*, jalur *Mass Rapid Transit* (MRT) diantaranya merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas transportasi Indonesia,” lanjut Dito.

Tidak hanya itu, menurut politisi Dapil Jawa Tengah VIII ini, perluasan *turning basin* bagi beberapa pelabuhan yang memberikan efek signifikan bagi mampunya kapal besar untuk bersandar, juga merupakan bentuk peningkatan kualitas sarana transportasi. Selain itu pengembangan jalur landasan pacu bandara yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan yang meningkat juga turut menentukan khususnya di Provinsi Bali.

Dito menjelaskan bahwa sebagai salah satu provinsi yang dimotori oleh sektor pariwisata, maka transportasi memang berperan sangat vital dalam perkembangannya. Menurutnya dengan pembangunan infrastruktur yang tepat oleh ketiga BUMN sektor transportasi tersebut, maka aksesibilitas antar daerah dapat dipercepat.

“Pengembangan infrastruktur transportasi ini akan menjadi sangat penting untuk mengurangi kesenjangan aksesibilitas dan meningkatkan integrasi wilayah Provinsi Bali. Maka dari itu sebagai fungsi pengawasan, DPR harus mengetahui segala perkembangan kinerjanya serta kendala yang dihadapi untuk ditemukan solusi bersama. Apalagi hal tersebut berkaitannya dengan anggaran,” tukas politisi Partai Golkar tersebut.

Kunker reses ke Bali juga dihadiri oleh Anggota Komisi VI DPR RI yaitu, Nyoman Dhamantra dan Muhammad Rakyhan Ihsan Yunus (F-PDI Perjuangan), Gde Sumarjaya Linggih dan Lili Asjudiredja (F-Golkar), Mohamad Hekal dan Khilmi (F-Gerindra), Wahyu Sanjaya dan Linda Megawati (F-Demokrat), Siti Mukaromah dan Lukmanul Khakim (F-PKB), Adang Daradjatun dari Fraksi PKS, Iskandar D. Syaichu dari Fraksi PPP, Nyat Kadir dan Hamdhani dari Fraksi Nasdem, serta Inas Nasrullah Zubir dari Fraksi Hanura. ■ **er/es**

Koordinasi Antar-BUMN Penting untuk Bangun Sinergi



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana memimpin Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera Barat. Foto: Eko I Hr

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menegaskan koordinasi antar-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya yang ada di Sumatera Barat penting guna membangun sinergi. Pernyataan tersebut dia sampaikan usai rapat dengan bersama mitra kerja dari Kementerian BUMN, Kemenprin, BKPM, dan beberapa BUMN, PT Semen Padang, PT Pelindo II, PT Bukit Asam, serta PT Hutama Karya.

“Oleh karena itu, perlu koordinasi yang baik antara Bukit Asam, Pelindo, Semen, dan Hutama Karya, agar berhasil dan berdaya guna. BUMN harus sinergi,” tandas Azam saat memimpin Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Barat, Kamis (2/5).

Azam menekankan koordinasi antar-BUMN mutlak dibutuhkan, terlebih lagi saat ini antara PT Hutama Karya (HK) dengan PT Semen Padang tidak

”

...PERLU KOORDINASI YANG BAIK ANTARA BUKIT ASAM, PELINDO, SEMEN, DAN HUTAMA KARYA, AGAR BERHASIL DAN BERDAYA GUNA. BUMN HARUS SINERGI

terlihat ada kerja sama yang baik. Dia menyarankan agar HK mengutamakan penggunaan Semen Padang dalam proyek yang dilakukannya, khususnya dalam pembangunan jalan tol.

“Pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh Hutama Karya harus melakukan sinergi dengan Semen Padang. Terkait penggunaan semen, dalam penggunaan semen kita dorong agar mengutamakan Semen Padang,” papar Azam.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan, saat ini Semen Padang mengekspor semennya ke luar karena serapan dalam negeri tidak bagus. Padahal ekspor semen ke luar bukanlah kebijakan yang menguntungkan secara ekonomi, dengan mempertimbangkan banyak hal.

Dia mengatakan Semen Padang tidak perlu mengekspor semen, karena sebaiknya semen digunakan di sekitar kawasan. Produksi semen diprioritaskan untuk kebutuhan domestik, bukan untuk ekspor. Ekspor hanya untuk pilihan terakhir.

“Jadi, penggunaan Semen Padang di kawasan tidak tinggi sehingga terpaksa harus diekspor. Diekspor itu tidak menguntungkan dari segi harga. Lebih bagus harga dalam negeri, itu yang kita dorong dari Hutama Karya agar semaksimal mungkin menggunakan produk-produk Badan Usaha Milik Negara,” tandas Azam. ■ eko/mh

Jargas Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam memastikan, DPR RI berkomitmen mendukung program pembangunan Jaringan Gas (Jargas) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk memenuhi kebutuhan gas masyarakat. Sebab, dinilai dari manfaatnya, program yang menggunakan APBN ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meringankan biaya kebutuhan sehari-hari.

“Program ini harus dilanjutkan, manfaatnya sudah jelas yaitu mengurangi biaya atau pengeluaran masyarakat. Itu yang penting, karena hubungannya dengan kesejahteraan. Artinya pengeluaran turun, (yang) berarti kesejahteraan meningkat,” kata Syaikhul saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meninjau Jargas rumah tangga di

Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Senin (29/4).

Dalam kesempatan tersebut, politisi F-PKB itu meminta agar pemerintah daerah aktif mengusulkan pemasangan Jargas di wilayahnya ke Kementerian ESDM, sehingga usulan tersebut dapat dibahas saat pembahasan anggaran dengan DPR RI. Ia pun berharap anggaran untuk program ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan, agar program ini tidak hanya dinikmati oleh sebagian warga saja, namun dapat dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia.

“Tentunya kami berharap program ini akan ditetapkan di seluruh Indonesia. Tapi saat ini memang Jawa Timur sepertinya yang terbesar ada sekitar 24.000 sambungan Jargas untuk tahun anggaran ini. Jadi di Jawa Timur sendiri ada di Sidoarjo, Surabaya, Lamongan, Pasuruan termasuk Kota dan Kabupaten Mojokerto,” jelas politisi dapil Jatim I itu.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan apresiasi atas program Jargas Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama DPR RI dan BUMN di Kota Mojokerto. Ia menjelaskan bahwa warga di Kota Mojokerto benar-benar menyambut baik program ini dan berharap pada tahun-tahun berikutnya program ini bisa dinikmati secara merata oleh seluruh warga Kota Mojokerto.

“Masyarakat mayoritas menyambut baik, karena memang sisi manfaatnya yang pertama adalah lebih aman dibandingkan tabung 'melon' dan yang kedua lebih hemat atau murah. Sesuai testimoni salah satu warga yang menggunakan Jargas, penghematannya bisa sampai 35 persen dalam satu bulan. Kemudian Jargas ini lebih mudah. Artinya warga tidak akan ada kehabisan gas di tengah malam karena selalu tersedia sepanjang waktu,” apresiasi Ika. ■ nap/sf



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam memimpin Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI meninjau Jargas rumah tangga di Kota Mojokerto. Foto: Natasya I Hr

Komisi VII Pertanyakan Harga Avtur ke Pertamina



Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi. Foto: Natasya I Hr

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi memunta penjelasan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT. Pertamina mengenai tingginya harga avtur yang banyak dikeluhkan oleh perusahaan maskapai penerbangan. Tingginya harga avtur dianggap sebagai salah satu penyebab utama tingginya tarif tiket pesawat saat ini. Meningkatnya tarif tiket ini pun sempat dikeluhkan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kurtubi saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Sekda Provinsi Jawa Timur, Wali Kota Mojokerto, Kapolda Jawa Timur, Pangdam V Brawijaya, jajaran Pejabat Eselon 1 Mitra Kerja Komisi VII DPR RI, PT. Pertamina, PT. PLN, PT. PGN, Exxon Mobil, Kepala BPH Migas dan Kepala SKK Migas di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Senin (29/4).

“Kita tanyakan (harga avtur) kepada pihak pemerintah dan BUMN yang hadir.

Ternyata setelah dijelaskan, bahwa sebenarnya harga avtur di Indonesia relatif bersaing termasuk dengan Singapura, apalagi dengan bandara-bandara di Thailand atau negara-negara ASEAN lain secara relatif harga avtur di Indonesia itu lebih murah,” jelas Kurtubi, usai pertemuan.

Politisi Partai NasDem tersebut menjelaskan, dari hasil pertemuan tersebut bahwa angka produksi atau harga jual avtur Indonesia ini bukanlah menjadi penyebab utama kenaikan harga tiket pesawat. Hal ini pun menjadi masukan yang sangat penting dalam mengevaluasi komponen-komponen yang membentuk harga tiket pesawat secara menyeluruh.

“Boleh jadi komponen-komponen lain itu yang justru bernilai tinggi, misalnya harga sewa atau harga pembelian pesawat terbang. Ini yang kurang diperhatikan oleh publik. Jangan-jangan pesawat yang sama kalau dijual ke Indonesia lebih mahal dibandingkan ke negara lain. Jangan-jangan pesawat yang sama persis kalo disewa atau dibeli oleh Indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan perusahaan luar negeri,” terang Kurtubi seolah bertanya.

Politisi dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) ini meminta agar komponen-komponen penentu harga tiket pesawat itu harus dilihat secara *fair* dengan fakta apa adanya dan tidak mengkambinghitamkan Pertamina. Menurutnya isu untuk memasukan perusahaan minyak asing sebagai penyedia avtur di Indonesia merupakan hal yang perlu dikaji secara matang.

“Lebih-lebih dengan data yang salah itu jadi ada ide untuk memasukan perusahaan minyak asing terus menjual avtur di semua bandara termasuk Bandara Soekarno-Hatta yang begitu

”

...SEBENARNYA HARGA AVTUR DI INDONESIA RELATIF BERSAING TERMASUK DENGAN SINGAPURA, APALAGI DENGAN BANDARA-BANDARA DI THAILAND ATAU NEGARA-NEGARA ASEAN LAIN SECARA RELATIF HARGA AVTUR DI INDONESIA ITU LEBIH MURAH

besar. Perusahaan asing boleh masuk hanya dengan alasan yang *enggak* bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Kurtubi.

Di sisi lain, Kurtubi meminta agar Kementerian ESDM bersama PGN dapat merealisasikan pembangunan Jaringan Gas (Jargas) di Desa Candi Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Ia menjelaskan bahwa saat ini ada 220 kepala keluarga yang belum tersambung Jargas, padahal desa sekitarnya sudah tersambung Jargas.

“Meskipun saya dapil NTB, saya adalah Anggota DPR RI yang wajib menyampaikan aspirasi masyarakat Surabaya, dimana sebagian desanya sudah tersambung jaringan gas agar yang belum juga segera tersambung. Saya sampaikan ke pemerintah dan Dirut PGN untuk dipelajari dan dilaksanakan. Karena ini pakai dana APBN. Jika dana APBN Komisi VII pasti setuju dan mendukung penuh. Mudah-mudahan ini bisa tersambung,” harap Kurtubi. ■ nap/sf

Komisi IX Tinjau Fasilitas BLK Bitung

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dipimpin Anggota Komisi IX DPR RI Sumarjati Arjoso meninjau fasilitas dan sarana prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Sumarjati mengatakan, perlu adanya peningkatan BLK dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan persiapan menuju implementasi industri 4.0.

“Yang ingin kita lakukan sekarang adalah mereka yang membutuhkan pekerjaan dilatih, kemudian lapangan pekerjaannya tersedia. Ketika selesai (mendapat pelatihan di BLK) mereka bisa bekerja. Ini artinya mengurangi angka kemiskinan menjadi sebuah keniscayaan,” kata Sumarjati di sela-sela memimpin Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI meninjau BLK Kota Bitung, Sulut, Kamis (2/5).

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, dalam kesempatan Kunker ini pihaknya juga ingin mendapat gambaran dan menyerap masukan mengenai ketenagakerjaan di Sulut. Pasalnya, di era revolusi industri dan bonus demografi, dengan lapangan kerja yang terbatas, perlu adanya peningkatan BLK dan kualitas tenaga kerja.

“Jadi, permasalahan tenaga kerja sangat banyak sekali. Lapangan kerja saat ini terbatas, karena kita memiliki banyak tenaga kerja, apalagi menuju bonus demografi. Jika banyak tenaga kerja, namun tidak ada lapangan pekerjaan, juga akan menjadi bencana,” kata legislator dapil Jawa Tengah III itu.

Sumarjati mengatakan, pihaknya terus mendorong pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk fokus memberikan sinergi dalam rangka mencetak para tenaga



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dipimpin Anggota Komisi IX DPR RI Sumarjati Arjoso. Foto: Sofyan I Hr

kerja berkualitas dan menghadapi tenaga kerja asing di BLK. Ia juga mendorong adanya penyesuaian antara kompetensi calon tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan kerja.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantiri menjelaskan, Pemerintah Kota Bitung dalam menciptakan tenaga kerja yang memiliki skill dan berdaya saing tinggi lewat Pelatihan Berbasis Kompetensi kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemkot Bitung.

“Dengan tersedianya SDM yang berkualitas tentunya meminimalisir masuknya tenaga kerja asing dan mengurangi angka pengangguran secara langsung berkontribusi terhadap pembangunan kota ini,” kata Maurits di hadapan Tim Kunker Komisi IX DPR RI.

Kunker ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi IX DPR RI, diantaranya Syamsul Bachri (F-PG/Sulawesi Selatan II), Dewi Asmara (F-PG/Jawa Barat IV), Andi Fauziah Pujiwati Hatta (F-PG/

”

JIKA BANYAK TENAGA KERJA, NAMUN TIDAK ADA LAPANGAN PEKERJAAN, JUGA AKAN MENJADI BENCANA.

Sulawesi Selatan III), Handayani (F-PKB/Jambi), Aryanto Munawar (F-PKB/Lampung I), Ali Mahir (F-NasDem/Jawa Tengah II), dan Jalaludin Akbar (F-Hanura/Sulawesi Selatan I).

Turut hadir Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut Erny Tumundo, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Pusat Rekson Silaban, Kepala UPTD BLK Kota Bitung Rahel Rotinsulu dan sejumlah mitra kerja terkait lainnya. ■ sf

Indonesia Harus Waspada Tingginya Kasus HIV AIDS

Kasus HIV (Human Immunodeficiency Virus)/AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Pemerintah diharapkan lebih waspada dan mengambil tindakan strategis serta membuat aturan tegas pencegahan penyebarannya. Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam mengatakan, jumlah populasi kasus HIV/AIDS mengkhawatirkan, ditambah lagi dengan penyebarannya kini melalui prostitusi dan perilaku seks menyimpang.

Menurutnya cara penyebarannya kini juga sangat memprihatinkan. Kalau dulu melalui narkoba dan suntikan, sekarang bertambah lagi dengan pergaulan bebas. Apalagi, sekarang tidak dipungkiri, perilaku LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) berkembang di Indonesia. Prostitusi juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya

perilaku ini.

“Kita tahu bahwa salah satu penyebaran HIV/AIDS itu hubungan sejenis. Jadi, langkah pemerintah yang pertama sekali memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya AIDS termasuk penyebaran dan cara menghindarinya. Sekaligus kita berharap, pemerintah daerah lebih giat lagi mencegah penyebaran AIDS di daerahnya,” katanya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah Kota Batam, di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (2/5).

Jumlah kasus HIV/AIDS di Kepulauan Riau pada tahun 2000-2018, yaitu HIV berjumlah 9461 kasus, AIDS berjumlah 3961 kasus, dan meninggal ada 1411 kasus. Suir menegaskan, pemerintah harus melakukan pengawasan dan tindakan, jangan sampai terlambat, kalau tidak korban akan terus bertambah.



Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam. Foto: Agung I Hr

“Pemerintah daerah dapat mengeluarkan Perda yang harus dipayungi oleh UU,” tegasnya. Politisi Partai Gerindra ini pun menambahkan, masyarakat perlu memperbaiki akhlakunya. Bagaimana masyarakat kembali beragama, sehingga mereka benar-benar menjalankan agamanya, melaksanakan perintah sesuai dengan agamanya, kemudian menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang agamanya. ■ as/mh

Komisi IX Pastikan Efektivitas UU PPMI di Bali

Komisi IX DPR RI ingin memastikan efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Bali. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan, para pekerja migran juga harus dipastikan mendapat akses perlindungan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Di Bali banyak pekerja migran yang bekerja di pelayaran, baik mereka yang bekerja di kapal pesiar, nelayan, dan lain sebagainya. Kita ingin memastikan apakah UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang PPMI yang sudah kita sahkan, efektif atau tidak, juga ingin memastikan para pekerjanya mendapatkan program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Saleh

saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali, Jumat (3/5).

Dari hasil peninjauan, dua regulasi itu, baik UU PPMI dan asuransi BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan efektif untuk para pekerja migran di Bali. Para pekerja di kapal pesiar bisa mendapatkan haknya. “Seluruh pekerja kita di luar negeri harus mendapat perlindungan dari negara. Untuk itu, kebijakannya harus terarah dan dilakukan sinkronisasi, agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik, sehingga para pekerja migran kita bisa terlindungi secara hukum dan mendapatkan hak-haknya,” tegas Saleh.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI ini meminta



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Andri I Hr

pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar membenahi sistem perlindungan pekerja migran, karena masih banyak pekerja migran Indonesia yang belum terlindungi hak-haknya. ■ man/mh



Sumbar Jadi Contoh Keberhasilan Kinerja



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Sumbar. Foto: Depri I Hr

Peningkatan kemampuan dan kinerja yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) patut dijadikan contoh bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pahalanya, di Sumbar kemajuan tak hanya terjadi pada satu sektor, melainkan di banyak sektor.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Sumbar, Kamis (2/5).

Pada kunjungan ini, ada beberapa pendalaman informasi yang digali dari Pemda dan *stakeholder* mitra kerja Komisi X DPR RI di Sumbar, di antaranya mengenai pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan Kurikulum 2013 (K-13) pada tahun 2018, serta evaluasi pelaksanaan ujian nasional 2019.

"Selain itu, kami sempat menanyakan tentang pelaksanaan pengelolaan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya di Sumatera Barat, khususnya dalam konteks pengembangan budaya lokal," ujar Hetifah.

Semua masukan dan informasi yang telah disampaikan itu, kata Hetifah, menjadi bahan referensi penting yang bisa digunakan dalam penyusunan program-program kerja selanjutnya oleh DPR dan Pemerintah Pusat. "Salah satunya yakni informasi tentang dampak keberadaan destinasi wisata di Sumatera Barat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kebijakan Pemda Sumatera Barat dalam mendukung target pemerintah di bidang pariwisata tahun 2019," jelas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Dalam paparannya di hadapan

Gubernur Sumbar dan pemangku kepentingan lainnya, Hetifah menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI telah mengesahkan 3 UU, yaitu UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan UU No.13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

"Adapun RUU yang sedang dalam proses pembahasan tingkat I yaitu RUU tentang Ekonomi Kreatif. Selain itu Komisi X DPR RI juga sedang mengkaji UU tentang Guru dan Dosen untuk dipisahkan menjadi UU Guru dan UU Dosen," tuturnya. Dalam fungsi anggaran, lanjut Hetifah, Komisi X DPR RI telah melakukan pembahasan dan menyetujui APBN TA 2019 mitra kerja Komisi X DPR RI pada Oktober 2018 lalu.

"Mengenai anggaran, kami menyampaikan bahwa alokasi anggaran infrastruktur pendidikan sebagian besar akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR RI, di antaranya untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dengan pagu sebesar Rp 3,8 miliar, dan untuk penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) Perguruan Tinggi Negeri dengan pagu Rp 1,6 miliar. Namun, sampai saat ini Komisi X DPR RI masih menanyakan landasan hukum yang jelas atas pengalihan alokasi anggaran tersebut serta menekankan perlunya pengawasan dari seluruh elemen masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengapresiasi Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumbar dan berharap kunjungan tersebut dapat membawa kebaikan bagi Sumbar khususnya terkait dengan bidang kerja Komisi X.

"Di bidang anggaran, Provinsi Sumatera Barat tidak sama seperti provinsi lain yang punya PAD, sehingga dukungan APBN melalui kementerian-kementerian terkait sangat kita butuhkan untuk membantu menyukseskan program-program yang ada," ucapnya. Irwan berharap anggaran untuk sektor pariwisata Sumbar supaya bisa ditingkatkan jumlahnya. ■ dep/mh

Pariwisata Kepulauan Riau Perlu Ditingkatkan

Sektor pariwisata di Kepulauan Riau (Kepri) perlu terus ditingkatkan. Dari data terakhir, angka kunjungan wisatawan sudah mencapai target, dari 2,3 juta menjadi 2,6 juta wisatawan. Ini prestasi membanggakan bagi Kepri.

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyampaikan hal itu saat memimpin kunjungan kerja Komisi X ke Batam, Kepri, Kamis (2/5). Ke depan masih perlu ada yang dibenahi lagi untuk peningkatan angka kunjungan wisatawannya. Seperti diketahui, Kepri merupakan destinasi favorit wisatawan mancanegara, selain Bali dan Jakarta.

“Kepulauan Riau, baik Batam, Pangkal

Pinang, dan sekitarnya, merupakan salah satu dari tiga daerah terbesar di Indonesia yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara. Pertama Bali, kedua DKI Jakarta, dan ketiga Kepulauan Riau. Oleh karena itu, Komisi X akan tetap menjaga agar jumlah tersebut tetap dan bahkan bisa meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Kepulauan Riau,” harap Ferdi.

Terkait dengan hal tersebut, penting juga untuk memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat menjadi daya tarik para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. “Perlu ada atraksi. Kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, agar membangun pariwisata yang berbasis kebudayaan. Hal tersebut menjadi penting dalam menjaga kelestarian budaya, sehingga dapat menjaga keutuhan NKRI melalui pariwisata,” papar politisi dari Fraksi Golkar itu.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga perlu menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang



Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah. Foto: Icha | Hr

memadai untuk dapat mengelola dan mendukung pariwisata di wilayah Kepri secara maksimal. “SDM sangat penting untuk menunjang kepariwisataan,” ungkap Ferdi.

Pada bagian lain, terkait momentum Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei, Ferdi menyampaikan harapannya terhadap dunia pendidikan di Batam. Isu penting dalam dunia pendidikan di Batam adalah soal distribusi guru. “Di Batam masih perlu ditingkatkan lagi pendistribusian guru, pelatihan, maupun pemberian motivasi, serta pembinaan para guru. Setiap sekolah tidak pernah lepas dari peran penting guru,” tutup Ferdy. ■ ica/mh

Komisi X Terima Aduan Sekolah Swasta di Medan

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menerima pengaduan dari Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda (YPSIM) Medan, Sumatera Utara terkait kondisi yang dialami sekolah swasta dalam sistem pendidikan yang berlaku saat ini di Indonesia.

Ada tiga persoalan yang diadakan oleh YPSIM Medan kepada Tim Kunker Komisi X DPR RI.

“Pertama, mereka menilai penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) dengan jalur undangan selama ini dinilainya tidak adil bagi sekolah swasta. Pasalnya, selama ini kesempatan bagi siswa dari sekolah swasta untuk bisa masuk ke PTN melalui jalur undangan sangat



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI tinjau YPSIM Medan. Foto: Ayu | Hr

kecil. Padahal, mereka menilai siswa cukup berkualitas dengan nilai yang cukup tinggi,” ujar Fikri di Medan, Sumatera Utara, Kamis (5/4).

Selain itu, kata politisi F-PKS itu, pihak yayasan juga mengadakan keterlambatan turunnya BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari pemerintah. Bahkan, hingga kini BOS belum juga turun. Padahal, banyak siswa tidak mampu yang bersekolah di sana.

Ketiga, lanjut Fikri, adalah

penyediaan buku murah yang belum lengkap. Selama ini pemerintah hanya menyediakan buku-buku wajib, sedangkan buku peminatan tidak disediakan. YPSIM Medan berharap pemerintah melengkapi pemberian buku-buku sekolah baik yang sifatnya buku wajib maupun buku peminatan.

Menanggapi hal tersebut, Fikri mengatakan, ke depan pihaknya akan membahas hal tersebut dengan pihak terkait. ■ ayu/mh/sf

Redesain Situs PPID Perkuat Keterbukaan Parlemen



Deputi Bidang Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti membuka iSeminar dan Launching Redesain Website PPID. Foto: Kresno I Hr

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI terus mewujudkan keterbukaan parlemen (*open parliament*). Hal itu terbukti dengan diresmikannya redesign situs (*website*) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai satu langkah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti saat mewakili Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar membuka “Seminar dan *Launching Redesign Website* PPID dengan tema Semangat Setjen dan BK DPR RI Menjadi Badan Publik Informatif” di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/3).

Maya, sapaan akrabnya menuturkan, melalui redesign situs PPID DPR RI



REDESAIN JUGA MENJADI SUATU LANGKAH PENGUATAN PPID DPR RI AGAR BISA LEBIH EFEKTIF DIGUNAKAN OLEH MASYARAKAT

merupakan upaya Setjen dan BK DPR RI dalam meningkatkan performa Layanan Informasi Publik secara daring (*online*) kepada masyarakat. Seperti diketahui, redesign juga merupakan suatu langkah untuk memenuhi hak informasi kepada semua masyarakat, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kompleks

Parlemen.

“Melalui redesign juga menjadi suatu langkah penguatan PPID DPR RI agar bisa lebih efektif digunakan oleh masyarakat, serta sebagai alat ukur Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan DPR RI. Diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai kegiatan yang ada di DPR RI, bukan hanya sebagai kanal pengajuan permohonan informasi,” jelas Maya.

Lebih lanjut Maya berharap melalui redesign situs PPID DPR RI menjadi suatu semangat bagi Setjen dan BK DPR RI demi terwujudnya badan publik yang informatif dengan baik. Harapan tersebut sejalan dengan keinginan DPR RI dalam terciptanya parlemen yang terbuka, transparan dan akuntabel.

“Untuk itu peluncuran *website* PPID ini harus dapat dipastikan membantu masyarakat secara terus menerus dalam memantau seluruh kegiatan para wakil rakyatnya. Sehingga dapat memunculkan rasa kepercayaan terhadap lembaga DPR ini,” imbuhnya.

Senada dengan Maya, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI Y.O.I Tahapari dalam sambutannya mengatakan peluncuran redesign situs PPID dalam penataan dan penyempurnaan konten informasi diharapkan dapat menjadi sarana media yang ramah pengguna, dengan mengedepankan perspektif kepentingan masyarakat sebagai pengakses informasi.

“Perbaikan ini akan terus dilakukan dari waktu ke waktu, sehingga DPR dapat menjadi badan publik yang informatif. Seperti yang diketahui seiring dengan perkembangan waktu tentunya diperlukan pengembangan dan penyesuaian fungsi *website* PPID DPR,” pungkas Hanny, sapaan akrab Tahapari.

■ hnm/sf

PKAKN DPR Apresiasi Komitmen **Disdik Kabupaten Bogor Awasi Dana BOS**

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar mengapresiasi komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam mengawasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Bogor, yaitu dengan cara membuat suatu sistem yang memudahkan sekolah dalam membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS.

“Itu yang paling menarik dan ini sangat sedikit sekali dilakukan oleh pemerintah kabupaten lainnya di Indonesia dalam pengelolaan pertanggungjawaban Dana BOS,” katanya usai memimpin pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, TB. Luthfie Syam beserta jajaran terkait pengawasan realisasi penggunaan Dana BOS di Kabupaten Bogor, di Ruang Rapat Kepala Dinas Pendidikan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/5).

Helmi menambahkan, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan Dana BOS dengan jumlah yang cukup bervariasi, dimulai di angka Rp 400 miliar, kini Dana BOS yang didapat Pemkab Bogor mencapai Rp 600 miliar per tahun. Helmi menilai penggunaan Dana BOS Pemkab Bogor sudah sesuai dengan ketentuan. Bahkan Pemkab Bogor sudah menerapkan *punishment* bagi sekolah yang belum membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS.

“Dan sangat menarik bahwa Kabupaten Bogor itu sudah



Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI Helmizar. Foto: Nadya I Hr

menerapkan *reward* dan *punishment*. Pada saat sekolah tidak membuat laporan, maka Kadis berhak memblok Dana BOS ke rekening sekolah-sekolah yang belum memberikan laporan, itu yang paling menarik,” ungkapnya sembari memaparkan temuan BPK bagi Disdik Kabupaten Bogor adalah belum dilakukannya SK Bupati soal penetapan rekening Dana BOS bagi sekolah-sekolah, meskipun secara prinsip akuntabilitas dan integritas Kabupaten Bogor sudah cukup baik.

Sementara Kepala Disdik Kabupaten Bogor Tubagus Luthfie Syam mengaku sangat senang dengan adanya kunjungan PKAKN BK DPR RI, karena

diharapkan PKAKN dapat menyuarakan seluruh keluh kesah Disdik Kabupaten Bogor. Ia berharap nantinya masukan yang diberikan Disdik Kabupaten Bogor bisa menjadi sebuah kajian yang dapat menjadi bahan pertimbangan Anggota DPR RI dalam pengambilan kebijakan.

“Kami sangat senang dengan adanya kunjungan PKAKN. Sebab dengan adanya kunjungan beliau, kami memiliki kesempatan untuk menyuarakan, dan mudah-mudahan bisa lebih menyuarakan ini. Jadi buat kami ini sangat penting, apalagi kalau ini nanti ditelurkan di dalam sebuah kajian yang akan diberikan menjadi semacam kertas kerja untuk bahan-bahan pengambilan kebijakan oleh Anggota DPR,” tutupnya. ■ ndy/sf

Peneliti Harus Paham Aturan dan Organisasi Profesi

Para peneliti diserukan agar memahami betul aturan kepenelitian dan organisasi profesi yang menaunginya. Tak terkecuali bagi para peneliti di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Keberadaan organisasi profesi bagi peneliti bisa menjaga kepentingan dan suara para peneliti.

Demikian disampaikan peneliti Setjen dan BK DPR RI sekaligus Ketua Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) cabang DPR RI Riris Katharina dalam seminar kepakaran yang diadakan Pusat Penelitian Setjen dan BK DPR di ruang Pansus B, Senayan, Jakarta, Kamis (2/5). Seminar kepakaran ini ditujukan agar para peneliti yang berada di lingkungan Setjen dan BK DPR RI mengetahui aturan yang berlaku bagi para peneliti. Selain itu, ada organisasi profesi peneliti sebagai wadah menyampaikan keluh kesah para peneliti.

“Jadi peneliti itu supaya tahu aturan yang berlaku seperti apa dan bagaimana. Kemudian organisasi profesi dapat memperjuangkan apa yang menjadi suara peneliti khususnya yang ada di DPR, mengingat peneliti di DPR RI ini sangat khas ya. Dia berdiri di dua kaki, satu sebagai peneliti di lembaga legislatif, tapi dia juga harus ikut kepada peneliti yang ngatur di lembaga eksekutif,” katanya usai menjadi moderator dalam seminar tersebut.

Seminar kepakaran ini bertemakan “Peran Organisasi Profesi Peneliti Dalam Menghadapi Tuntutan Peneliti di Masa Mendatang”. Riris mengemukakan, banyak kendala yang kerap dialami oleh para peneliti di DPR RI saat mendampingi Anggota DPR RI dalam menyusun suatu kebijakan atau regulasi. Satu sisi, waktu sebagai peneliti dihabiskan untuk memberikan *advice* kepada Anggota.

Namun, di lain sisi para peneliti juga



Peneliti Setjen dan BK DPR RI sekaligus Ketua Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) cabang DPR RI Riris Katharina bersama peserta seminar kepakaran. Foto: Gerald I Hr

memiliki kewajiban akademis yang justru di situlah nasib karirnya ditentukan.

Nilai akademis para peneliti ditentukan oleh LIPI. “Jadi, ini yang membuat kami kadang kehilangan waktu yang banyak untuk memenuhi kebutuhan yang nilainya akademis tadi. Sementara karir kami sangat ditentukan oleh nilai-nilai akademis yang tadi dikeluarkan LIPI,” tandasnya sembari berharap antara LIPI, Himpenindo, dan lembaga peneliti DPR RI terjalin sinergi yang kuat. Harapannya para peneliti dapat terus memberikan kontribusinya.

Sementara Ketua Himpenindo (Himpunan Peneliti Indonesia) yang juga Peneliti Ahli Utama di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Syahrir Ika memaparkan, modal yang harus dimiliki oleh para peneliti di DPR RI adalah dapat memberikan *advice*-nya kepada Anggota DPR RI dalam menyusun kebijakan atau regulasi.

Sementara beberapa modal lainnya yang harus dimiliki peneliti adalah kompetensi dan peningkatan berkala kompetensinya, penegakan etika dan perilaku peneliti, mampu berkomunikasi dengan pihak-pihak luar agar dapat

”

..... MODAL YANG HARUS DIMILIKI OLEH PARA PENELITI DI DPR RI ADALAH DAPAT MEMBERIKAN *ADVICE*-NYA KEPADA ANGGOTA DPR RI DALAM MENYUSUN KEBIJAKAN ATAU REGULASI

membuat sebuah tulisan atau karya yang terpakai, dan juga memiliki keberanian untuk menjual gagasannya.

“Karena biasanya para peneliti itu kadang-kadang takut. Padahal, karyanya bagus tapi dia tidak menjual gitu. Jadi, menurut saya dia berkarya tetapi dia masih bisa menjual gagasannya itu *enggak usah* tanggung-tanggung. Gagasannya itu tidak hanya di level komisi, tapi langsung bisa ke level ketua,” katanya. ■ **ndy/mh**

Biro Pemberitaan Parlemen Terima Sekretariat DPRD Jawa Tengah

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Y.O.I Tahapari didampingi Kepala Bagian Penerbitan Setjen dan BK DPR RI Dadang Prayitna, menerima kunjungan *benchmarking* Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ia menjelaskan, tujuan kunjungan ini untuk mengetahui mekanisme pembuatan laporan kinerja Anggota Dewan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Mereka akan membuat (buku) memori anggota. Kalau di sini (DPR RI) namanya laporan kinerja yang dibuat satu tahun sekali dan dilaporkan pada tanggal 29 Agustus tepat di ulang tahun DPR RI,” jelas Hanni, sapaan akrabnya, usai memimpin pertemuan kunjungan *benchmarking* di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5).

Proses pembuatan laporan kinerja, lanjut Hanni, dibuat berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Selama masa sidang, setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) membuat laporan kinerja baik kegiatan di dalam gedung DPR maupun di luar DPR RI. Laporan kinerja dari masing-masing AKD nantinya dilaporkan kepada tim penyusun laporan.

“Sebelum dilaporkan dalam rapat pimpinan, laporan diberikan kepada tim tata bahasa serta tenaga ahli untuk dilihat kesesuaian laporan dengan tata bahasa serta kesesuaian laporan dengan tata tertib yang ada,” ungkapnya.

Sebelumnya,

”

...LAPORAN KINERJA, DIBUAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD (UU MD3)

Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Raidun Manurung menanyakan mekanisme dalam pembuatan memori anggota selama lima tahun menjabat. “Ini kali pertama kami ditugasi membuat memori anggota, maka dari itu kami pikir tepat bila kami mengunjungi Sekretariat DPR RI untuk mengetahui mekanisme dalam membuat

buku memori. Kami mau mengetahui aturan yang digunakan serta format pembuatan laporan itu,” jelasnya.

Setelah pertemuan selama satu setengah jam, Rai selaku ketua tim Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Biro Pemberitaan Parlemen dan Kabag Penerbitan Setjen dan BK DPR RI yang telah menerima kunjungannya dengan sangat hangat.

■ rnm/mh/sf

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Y.O.I Tahapari. Foto: Azka I Hr



Sambut Ramadan, P3S DPR Bersilaturahmi

Menyambut bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, Persatuan Pensiunan Pegawai Sekretariat (P3S) Jenderal DPR RI menggelar pertemuan silaturahmi untuk kembali menguatkan ikatan emosional dan persaudaraan. Sebagai sesama pensiunan pegawai dari sebuah lembaga parlemen, sangat penting untuk tetap berkomunikasi dan mengikuti informasi aktual yang berkembang.

Bertempat di ruang rapat Komisi V DPR RI, Kamis (3/5), Ketua P3S Toip Heryanto membuka acara yang

didampingi para pengurus lainnya. Hadir pula penasihat P3S Achmad Djuned di tengah ratusan para pensiunan tersebut. Pertemuan ini sekaligus juga menyambut 50 tahun P3S sebagai organisasi yang menaungi para purna bakti di lingkungan Sekjen DPR RI.

“50 tahun usia organisasi ini sebetulnya masih muda. Namun, selalu aktif menggelar kegiatan secara berkala, seperti pertemuan-pertemuan, rekreasi, dan bazar. Itu menandakan organisasi ini hidup,” ucap Djuned dalam sambutannya. Kelak, sambung mantan Sekjen DPR RI, ada Yayasan P3S yang

dibentuk untuk mendukung cita-cita dan harapan P3S ke depan.

Tema silaturahmi P3S kali ini, “Dengan P3S Pensiunan Dapat Memelihara Ikatan Batin Antara Sesama Pensiunan Itu Sendiri dan Dengan Para Pegawai Setjen dan BK DPR RI yang Masih Aktif”. Ada Ustaz Badrun Arifuddin sebagai penceramah dalam pertemuan silaturahmi tersebut. Wejangan jelang Ramadan pun disampaikan untuk menyegarkan dan merefleksikan kembali ingatan kolektif para pengurus P3S pada nilai silaturahmi dan kemuliaan Ramadan. ■mh



Suasana acara silaturahmi Persatuan Pensiunan Pegawai Sekretariat (P3S) Jenderal DPR RI. Foto: Jaka

Segenap Pimpinan dan Anggota DPR RI,
serta Pejabat dan Karyawan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

mengucapkan

**Selamat Menunaikan Ibadah
Puasa Ramadan 1440 Hijriah**

“Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh mahrifah ini”



Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti berfoto bersama dengan pengurus DWP Setjen dan BK DPR RI. Foto: gerardi

DWP Setjen dan BK DPR Memperingati Hari Kartini

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI menyelenggarakan bakti sosial dan kegiatan lomba dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April. Deputi Persidangan Setjen dan BK DPR RI Damayanti memberikan apresiasi kepada Pengurus DWP yang mendukung acara tersebut tetap terlaksana setiap tahunnya.

“Yang penting ini adalah hari berbagi. Karena, dengan ajang seperti ini kita (Anggota DWP) akan saling bertemu dan bersilaturahmi,” ucap Maya, sapaan akrabnya, saat memberikan sambutan dalam acara bakti sosial dan kegiatan lomba DWP Setjen dan BK DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5).

Maya menuturkan, menjadi momentum murid TK Risanti yang

”

“YANG PENTING INI ADALAH HARI BERBAGI. KARENA DENGAN AJANG SEPERTI INI KITA (ANGGOTA DWP) AKAN SALING BERTEMU DAN BERSILATURAHMI

berada dalam bimbingan DWP Setjen dan BK DPR RI untuk tampil. Terdapat 3 kategori lomba yang dapat diikuti oleh peserta dari perwakilan masing-masing unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI seperti, *fashion show* baju adat, menghias tumpeng dan memasang dasi.

Maya mengapresiasi upaya DWP yang telah memberikan kontribusi dalam membantu kegiatan Setjen dan BK DPR RI. Ke depannya, Maya berharap, bisa

terus terjalin kerja sama dan silaturahmi yang baik. “Juga bisa mengeksplor prestasi dari anak-anak kita (yang berada dalam bimbingan DWP) agar terus mengukir prestasi” saran Maya.

Hal senada diungkapkan Ketua DWP Setjen dan BK DPR RI Tanti Setyanta Nugraha. Ia mengatakan, berlangsungnya peringatan Hari Kartini dalam rangka silaturahmi yang terjalin antara pejabat Setjen dan BK DPR RI serta komponen DWP DPR RI juga memberikan santunan kepada salah satu panti asuhan di daerah Binong Permai, Tangerang, Banten.

Di samping itu, ia mengatakan persiapan yang dilakukan untuk peringatan Hari Kartini berjalan kurang dari satu bulan. “Tetapi kami yakin sudah bisa mempersiapkan acara ini dengan baik atas kerja sama yang terjalin dengan Anggota DWP maupun panitia acara” tegas Tanti. ■ hnm/sf

Komisi V Resmikan Rusun Mahasiswa NTT

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis meresmikan Rumah Susun (Rusun) Mahasiswa Seminari Tinggi Interdiocesan St. Petrus Ritapiret di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan diresmikan rusun mahasiswa tersebut, diharapkan mahasiswa bisa fokus belajar dan bisa belajar sebagaimana hidup di dalam rusun, yaitu belajar saling toleransi.

“Ini merupakan rusun yang sangat baik dan tertata, warga kampusnya juga ikut mengawasi jalannya pembangunan, tinggal nantinya para warga rusun memelihara fasilitas yang sudah diberikan. Tidak ada negara yang besar tanpa adanya pendidikan yang memadai,” tutur Fary di sela-sela memimpin Tim Kunjuran Komisi V DPR RI meninjau Rusun Mahasiswa Seminari di Sikka, NTT, Jumat (3/5).

Legislator Partai Gerindra dan daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur itu juga berpesan dengan diresmikan rusun untuk mahasiswa bisa membuat mahasiswa lebih fokus dalam belajar, serta meningkatkan level pendidikan di NTT dan para mahasiswa bisa ikut andil dalam memajukan NTT.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menuturkan, berdirinya rusun untuk mahasiswa ini merupakan upaya mencerdaskan bangsa melalui sarana dan prasarana. “Kita harus bersyukur banyak sekolah yang berupaya ingin mencerdaskan bangsa, salah satunya Seminari Tinggi Ritapiret yang berupaya membuat negara maju melalui membangun SDM yang mumpuni,” tutur legislator PKS itu.

Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi menuturkan, spirit pembangunan rusun mahasiswa agar seluruh penghuni



Tim Kunjuran Reses Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis meresmikan Rumah Susun (Rusun) Mahasiswa Seminari Tinggi Interdiocesan St. Petrus Ritapiret di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Foto: Chasbi I Hr

”

TIDAK ADA NEGARA YANG BESAR TANPA ADANYA PENDIDIKAN YANG MEMADAI

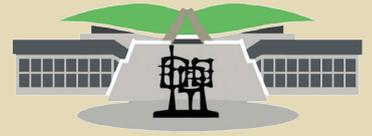
rusun bisa saling bertoleransi dan ini merupakan upaya pemerintah yang wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan. “Saya berterima kasih banyak kepada Komisi V yang telah memberikan banyak bantuan ke NTT termasuk pembangunan rusun Seminari ini,” apresiasi Wagub NTT.

Sementara itu Rektor Seminari Tinggi Interdiocesan St. Petrus Ritapiret Romo Philipus Ola Daen sangat berterima kasih kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah memberikan rusun ini. “Seminari Ritapiret sudah banyak menghasilkan Uskup,

Romo, dan Awam yang sudah tersebar di penjuru nusantara. Lulusan St. Petrus Ritapiret bisa bekerja di berbagai bidang baik untuk di gereja ataupun di sipil,” tutur Romo Philipus.

Dirut Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Yusuf Heri Agung menuturkan, pembangunan Rusun Seminari Ritapiret ini merupakan upaya negara untuk hadir di masyarakat. Rusun ini sifatnya melatih warga rusun untuk bisa beradaptasi di rusun, yang akhirnya saling bisa toleransi antar warga rusun. Rusun yang berkapasitas 144 orang tersebut juga sudah dilengkapi fasilitas yang nyaman dari tempat tidur hingga fasilitas lainnya.

Diharapkan nantinya mahasiswa bisa beristirahat dengan nyaman serta fokus belajar. “Ini merupakan rusun yang sudah dilengkapi dengan fasilitas lengkap. Rusun juga sudah dilengkapi dengan kamera pemantau atau CCTV, sekarang tinggal warga rusun untuk merawatnya,” tutur Yusuf. ■ rh/sf



Suasana Booth Museum DPR RI dalam acara Expo Nusantara 2019 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sabtu, (20/4).
Foto: Eno



Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Rahmat Budiaji menerima konsultasi DPRD Kabupaten Asahan terkait penambahan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam APBN, Senin (29/4).
Foto: Geraldi



Suasana pelepasan dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang memasuki masa pensiun, Selasa (30/4).
Foto: Andri

